

# Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas: Strategi Presiden Prabowo dan Dampaknya

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara dengan mengusulkan akan memangkas anggaran perjalanan dinas pejabat pemerintah hingga 50%. Kebijakan ini diumumkan dalam Sidang Kabinet pada 22 Januari 2025, di mana Presiden menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah krusial untuk memperkuat alokasi dana ke sektor-sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

Pemotongan anggaran perjalanan dinas ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi belanja negara sebesar Rp 306,7 triliun pada tahun 2025, atau sekitar 8% dari total anggaran yang telah disetujui. Selain itu, Presiden juga menginstruksikan penyederhanaan acara seremonial pemerintah guna menghemat lebih banyak anggaran.

Dalam sidang kabinet tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa anggaran perjalanan dinas dan pengeluaran seremonial harus dialihkan ke program-program prioritas, termasuk perbaikan infrastruktur pendidikan dan program bantuan sosial. Salah satu sektor yang mendapatkan manfaat dari efisiensi ini adalah pendidikan, dengan rencana pemerintah untuk menggunakan dana hasil penghematan guna memperbaiki ribuan sekolah yang membutuhkan renovasi.

Selain itu, pemerintah juga berencana memperluas program pemberian makanan gratis bagi siswa sekolah, yang ditargetkan meningkat dari 17,5 juta penerima menjadi 82,5 juta penerima pada akhir tahun. Program ini diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun, yang diharapkan dapat dipenuhi melalui efisiensi pengeluaran negara.

Langkah pemotongan anggaran ini disambut baik oleh berbagai pihak sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih bijaksana. Dengan mengalihkan dana dari pos-pos yang dianggap kurang prioritas ke sektor-sektor yang lebih bermanfaat, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan ekonom mengenai potensi dampaknya terhadap efektivitas kerja birokrasi dan diplomasi internasional. Pembatasan perjalanan dinas dapat mengurangi kesempatan bagi pejabat untuk membangun hubungan kerja sama internasional dan menghadiri forum-forum penting di luar negeri.

Selain itu, meskipun efisiensi ini dapat membantu menekan defisit anggaran, pemerintah juga harus mempertimbangkan strategi lain untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Beberapa pihak menilai bahwa pemotongan anggaran ini harus diimbangi dengan peningkatan efektivitas program-program yang telah dirancang agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Kebijakan efisiensi anggaran perjalanan dinas yang diterapkan oleh Presiden Prabowo menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih hati-hati dan efektif. Dengan memangkas ini, pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk sektor pendidikan, kesejahteraan sosial, dan program prioritas lainnya. Meski begitu, tantangan dalam implementasi

kebijakan ini tetap perlu diantisipasi agar tidak berdampak negatif pada kinerja birokrasi dan hubungan diplomasi Indonesia di tingkat global.

Langkah ini merupakan awal dari reformasi anggaran yang lebih luas, yang jika dijalankan dengan baik, dapat membawa Indonesia menuju pengelolaan keuangan negara yang lebih sehat dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.